



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DAMSYI
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 14054

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.615.000.000

1. Tanah Seluas 2280 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 9270 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 17150 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 309 m2/120 m2 di LAMPUNG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
5. Tanah Seluas 900 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI
Rp. 115.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 453.500.000

1. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2010,
HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
3. MOBIL, FORTUNER G Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
440.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 76.250.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 269.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.413.750.000



III. HUTANG

Rp. 175.975.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.237.775.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.